



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMAD NUR**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM, AKADEMIK, DAN KEMAHASISWAAN**
3. NHK : **972079**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.420.250.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA PARIAMAN , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 1220 m2 di KAB / KOTA PADANG PARIAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 244.000.000
3. Tanah Seluas 179 m2 di KAB / KOTA KOTA PARIAMAN , HASIL SENDIRI Rp. 402.750.000
4. Tanah Seluas 147 m2 di KAB / KOTA KOTA PARIAMAN , HASIL SENDIRI Rp. 73.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **427.000.000**

1. MOTOR, SUZUKI KAWASAKI Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU JEEP Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. MOTOR, YAMAHA SPM SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000



6. MOTOR, KAWASAKI TRAIL Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
7. LAINNYA, POLIGON COSMIX RX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
8. LAINNYA, ELEMENT TROYI GOLDEN EDITION Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	99.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	229.786.620
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.176.036.620
III. HUTANG	Rp.	100.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.076.036.620

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.